

## Nalar Humanisme Dalam Pedagogi Kritis: Perspektif Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, Dan Peter McLaren



Putu Yulia Angga Dewi <sup>1✉</sup>, Jumari <sup>2</sup>, I Gusti Ayu Agung Sinta Diarini <sup>3</sup>,  
Putu Kerti Nitiasih<sup>4</sup>, Putu Nanci Riastini<sup>5</sup>, I Gde Wawan Sudatha<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, Indonesia

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Dhyana Pura Bali, Indonesia

<sup>4,5,6</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

### Abstrak

Fokus tulisan ini adalah untuk mengkaji secara kritis dan komprehensif tentang nalar humanisme dalam pedagogi kritis menurut pandangan tiga tokoh pendidikan, yakni Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan Peter McLaren. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pendekatan tinjauan literatur integratif. Hasil penelitian menemukan; 1) nalar humanisme dalam pedagogi kritis Ki Hadjar Dewantara ditegaskan melalui pendidikan yang humanis, kerakyatan (*wong cilik*), dan kebangsaan sebagai dasar jiwa untuk mendidik bangsa, dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan dan kemandirian; 2) nalar humanisme dalam pedagogi kritis Paulo Freire ditegaskan melalui konsep konsientisasi (*proses penyadaran*) yang menempatkan manusia sebagai subyek dalam kehidupan. Peserta didik harus mampu mengekspresikan keinginan dan kreatifitasnya, bukan sebagai obyek atau selalu menerima perlakuan dari orang lain, sehingga manusia mampu hidup sesuai dengan kodratnya yaitu manusia yang merdeka; dan 3) pedagogi kritis Peter McLaren menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membangun masyarakat baru yang lebih humanis. Pendidik dan peserta didik harus saling berdiskusi dalam menentukan kebenaran, sehingga objektifitas akan terjaga dengan adanya diskusi dan dialektika. Pedagogi kritis revolusioner mempertegas bahwa tujuan pendidikan adalah empowering siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki.

**Kata Kunci:** *Humanisme; Pedagogi Kritis; Ki Hadjar Dewantara; Paulo Freire; Peter McLaren*

### Abstract

The focus of this paper is to examine critically and comprehensively the reason for humanism in critical pedagogy according to the views of three educational figures, namely Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, and Peter McLaren. This type of research is qualitative with integrative literature review approach method. The results found; 1) the reason for humanism in the critical pedagogy of Ki Hadjar Dewantara is emphasized through humanist education, people (*wong cilik*), and nationality as the basis of the soul to educate the nation, and direct it to the politics of liberation or independence and independence; 2) the reason for humanism in Paulo Freire's critical pedagogy is emphasized through the concept of consciousness (*awareness process*) that places humans as subjects in life. Learners must be able to express their desires and creativity, not as objects or always receive treatment from others, so that humans are able to live according to their nature, namely independent humans; and 3) critical pedagogy Peter McLaren emphasizes that the purpose of education is to build a new society that is more humanist. Educators and learners must discuss with each other in determining the truth, so that objectivity will be maintained by discussion and dialectics. Revolutionary

---

critical pedagogy affirms that the purpose of education is empowering students according to their potential.

**Keywords:** *Humanism; Critical Pedagogy; Ki Hadjar Dewantara; Paulo Freire; Peter McLaren*

Copyright (c) 2024 Putu Yulia Angga Dewi

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

---

✉ Corresponding author: Putu Yulia Angga Dewi

Email Address : [anggadewiyulia@gmail.com](mailto:anggadewiyulia@gmail.com)

Received 16 April 2024, Accepted 2 May 2024, Published 15 May 2024

DOI: <https://doi.org/10.55115/edukasi.v5i1.5672>

Publisher: Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

---



## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Namun, pendidikan yang tidak mengintegrasikan prinsip-prinsip humanisme dan kritis dapat menghasilkan pendidikan yang tidak efektif dan tidak mampu memenuhi kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, pedagogi kritis menjadi pendekatan pendidikan yang menekankan pada pembebasan, keadilan sosial, dan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Pedagogi kritis berusaha mengubah struktur pendidikan yang ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, demokratis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pedagogi kritis, dengan pendekatan yang kompleks dan luas, mencakup berbagai aspek pendidikan seperti teknik pengajaran, institusi sekolah, isi pengetahuan, kurikulum, teknologi, kepentingan ekonomi, budaya, dan struktur serta kekuasaan politik yang menentukan pendidikan. Pedagogi kritis berusaha mengatasi masalah-masalah pokok pendidikan seperti dominasi dan penindasan dalam praktik pendidikan, produksi pengetahuan, dan metode pengajaran yang tidak inklusif. Pedagogi kritis juga menekankan pentingnya keadilan sosial, politis, dan kesamaan dalam pendidikan. Dengan demikian, pedagogi kritis menjadi gerakan sosial yang menggunakan teori-teori sosial kritis untuk menyoroti pendidikan dan membantu siswa mempertanyakan, menantang, dan meruntuhkan kepercayaan dan praktik dominasi dalam pendidikan.

Namun, dalam konteks pedagogi kritis, terdapat beberapa perspektif yang berbeda, seperti perspektif Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan Peter McLaren. Pedagogi kritis yang juga dikembangkan oleh Paulo Freire, Michael W. Apple, dan Peter McLaren menekankan bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan politik melalui pemikiran kritis. Pendidikan kritis dipahami sebagai paradigma pendidikan yang menggabungkan teori dan praktik, dengan tujuan utama membekali individu-individu yang terpinggirkan dengan kesadaran yang diperlukan untuk terlibat dalam praksis emansipatoris. Di Indonesia sendiri, Ki Hadjar Dewantara (KHD) dikenal sebagai tokoh pembaharu (pedagogi kritis) dalam dunia pendidikan nasional. Dalam pandangan KHD upaya untuk mendidik kaum muda merupakan syarat utama dalam membebaskan diri dari jeratan penjajah. Pendidikan yang mendasarkan kebudayaan nasional dapat menghindarkan dari kebodohan (Zuriatin dkk., 2021). Dalam pandangan pedagogi kritis, pendidikan dilihat sebagai sesuatu yang amat penting di dalam pengembangan demokrasi. Demokrasi tidak akan dapat terbentuk, tanpa adanya budaya pendidikan yang mampu mendorong semua warga untuk berpikir kritis, reflektif, berwawasan luas, mampu membuat penilaian moral yang seimbang, serta bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial (Wattimena, 2016). Masing-masing perspektif ini menawarkan pandangan unik tentang bagaimana pedagogi kritis dapat diintegrasikan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif, demokratis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

---

Di Indonesia pedagogi kritis secara eksplisit telah menjadi alasan pembentukan dalam Kurikulum 2013 (K-13) yang mana mengedepankan kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan moral, dan kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya. Pada pengimplementasiannya masih banyak yang jauh dari gagasan atau tujuan awal kurikulum ini dicanangkan. Masih jelas teringat, salah satu guru SMA saya yang mengubah pola pembelajarannya dengan sistem presentasi dan pemahaman materi secara mandiri oleh siswa. Ketika pendidik lain mengeluh karena jangkakan mempresentasikan materi, mengerti maksud materi saja belum. Guru menjawab bahwa ini adalah proses belajar yang diharuskan dalam K-13 agar siswa lebih banyak aktif di kelas dan mandiri belajar. Begitupula yang terjadi saat ini dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemampuan berpikir kritis dan tingkat tinggi dibutuhkan oleh siswa dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru.

Melalui pendidikan kritis dalam pelaksanaan maupun pengembangan kurikulum, peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya, manusia yang memiliki hak yang hakiki yang tidak dapat dirampas keberadaannya. Huda (2019) menyebutkan, dalam pengembangan kurikulum sekurang-kurangnya terdapat empat pendekatan, yaitu; *pendekatan subjek akademis* yang bersumber pada aliran pembelajaran klasik yang berorientasi pada masa depan; *pendekatan humanistik* dimana lebih membagikan tempat utama kepada peserta didik dalam proses pembelajaran; *pendekatan teknologis* yang memiliki kesamaan dengan pendekatan subjek akademis yang menekankan pada isi dan materi kurikulum; dan *pendekatan rekonstruksi sosial* yang didasarkan pada aliran interaksional. Pendidikan humanis berpegang pada teori Gestalt yang memandang bahwa anak merupakan satu kesatuan yang merata. Pembelajaran ditunjukkan untuk membentuk manusia yang utuh bukan saja dari segi raga, intelektual. Namun, menyangkut pula aspek sosial dan afektif (perilaku, emosi, perasaan, dan nilai). Pendidikan humanisme merupakan model pendidikan yang mengarahkan dan memandang manusia sebagai manusia (humanisasi), yaitu makhluk yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, dalam membimbing, memelihara, dan mengembangkan kehidupannya

Oleh karena itu, latar belakang masalah dari judul artikel ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan perspektif pedagogi kritis dari Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan Peter McLaren dalam konteks pendidikan, dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip humanisme dapat diintegrasikan dalam pedagogi kritis untuk mencapai pendidikan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau studi literatur dimana peneliti menggunakan berbagai literatur. Untuk memperoleh data penelitian dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata atau deskripsi. Penelitian kepustakaan atau studi literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Kualitatif dengan karakteristik latar yang alamiah (*naturalistic inquiry*), peneliti adalah sebagai instrumen kunci, bersifat deskriptif, lebih menekankan proses daripada hasil, analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna.

Metode pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah tinjauan literatur integratif, yakni dengan penelaahan literatur melalui proses menganalisis, mengkritisi, dan mensintesis sejumlah literatur representatif mengenai topik yang relevan dengan masalah secara terintegrasi sedemikian rupa sehingga dihasilkan kerangka kerja dan perspektif baru (Callahan, 2010).

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan pencarian dan pengumpulan literatur yang relevan dari berbagai sumber, termasuk database akademik, jurnal ilmiah, buku, dan *platform online* terkemuka. Istilah penelusuran yang digunakan mencakup "nalar humanisme", "pedagogi kritis", "Ki Hadjar Dewantara", "Paulo Freire", "Peter McLaren", dan istilah-istilah terkait. Literature review menggunakan literature

---

terbitan 5 tahun terakhir dari rentang 2020-2024. Terdapat 25 artikel yang direview, artikel tersebut didapatkan dari jurnal nasional terakreditasi sinta 2 sampai jurnal internasional bereputasi.

Sebagai tinjauan literatur integratif, penelitian ini tidak melibatkan interaksi langsung dengan partisipan manusia. Namun, pertimbangan etis tetap penting dalam memastikan kutipan dan atribusi sumber yang tepat. Kehati-hatian diberikan untuk merujuk secara tepat semua karya yang dikutip, memberikan penghargaan kepada penulis asli dan menghindari plagiarisme.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konsepsi, selain oleh Henry A. Giroux, pedagogi kritis yang juga dikembangkan oleh Paulo, Michael W. Apple, dan Peter McLaren menekankan bahwa persoalan pendidikan adalah persoalan politik melalui pemikiran kritis. Wahyuni dkk. (2021: 38) menyebutkan, pendidikan kritis dapat dipahami sebagai paradigma pendidikan yang menggabungkan teori dan praktik, dengan tujuan utama membekali individu-individu yang terpinggirkan dengan kesadaran yang diperlukan untuk terlibat dalam praksis emansipatoris. Menurut Wattimena (2016), dalam pandangan pedagogi kritis, pendidikan dilihat sebagai sesuatu yang amat penting untuk pengembangan demokrasi. Demokrasi tidak akan dapat terbentuk, tanpa adanya budaya pendidikan yang mampu mendorong semua warga untuk berpikir kritis, reflektif, berwawasan luas, mampu membuat penilaian moral yang seimbang, serta bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial.

Sementara humanisme, secara konsepsi merupakan aliran pemikiran untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan cita-cita pergaulan hidup yang lebih baik (TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995: 361). Tarpin (2008: 343) menyatakan, lembaga apapun yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dalam perspektif humanisme pada dasarnya merupakan “proses humanisasi, dalam arti mengolah potensi-potensi yang dimiliki seseorang untuk menjadi lebih manusiawi”.

Konsepsi pedagogi kritis dan humanisme tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 1. Dalam konteks ini, penting kiranya untuk diperhatikan secara cermat tentang konsepsi humanisme sebagaimana disebutkan Atmadja (2019: 580), bahwa humanisme merupakan aliran pemikiran yang muncul di Eropa sejak zaman Yunani Kuno dan terus berkembang sampai saat ini dengan berbagai variasi pemikiran, dimana; (1) memandang individu rasional sebagai nilai tertinggi; (2) memandang individu sebagai sumber nilai tertinggi; dan (3) ditujukan untuk membina perkembangan kreatif dan moral individu dengan cara yang bermakna dan rasional *tanpa merujuk pada konsep-konsep adikodrati*. Dalam hal ini disebutkan klausul pruden, yakni *tanpa merujuk pada konsep-konsep adikodrati*. Sementara tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah untuk membentuk manusia yang berkarakter holistik, bukan saja dari aspek intelektual, namun menyangkut pula aspek sosial dan afektif.

Pencapaian sasaran humanisasi (manusia yang berkarakter holistik) tidaklah mudah, karena ada berbagai kendala antara lain bersumberkan pada manusia, yakni: (1) insting dasar untuk hidup (*vivendi*), yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan agar bisa hidup, misalnya mencari makanan; (2) insting dasar seksual (*sexualis*), dimana manusia melakukan hubungan seksual antara lain lewat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan nafsu seksual, tetapi juga mempertahankan keturunan; (3) insting dasar *dominandi*, yakni dorongan untuk sukses dan/atau mencapai suatu prestasi yang tinggi dalam kehidupan; dan (4) insting dasar *possendi*, yakni dorongan sukses dan/atau prestasi untuk memiliki sesuatu demi hidupnya sendiri dan/atau keluarganya (Tarpin, 2008: 346-348).

Permasalahannya, keempat insting dasar tersebut adalah bersifat ambivalen. Manusia tidak saja memiliki insting-insting dasar tersebut, tetapi juga dualitas yang melekat pada dirinya. Misalnya, manusia tidak saja makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Manusia tidak berdimensi kejasmanian, tetapi juga kerohanian. Manusia tidak saja berdimensi

kematerian, tetapi juga kespiritualitasan (Tarpin, 2008: 348). Dimensi-dimensi ini tidak boleh saling menafikan guna menghasilkan manusia yang holistik (manusia yang berkarakter utuh dan seimbang). Gagasan ini berimplikasi bahwa pendidikan sebagai humanisasi, tidak boleh menafikan salah satunya, melainkan bagaimana menumbuh-kembangkannya secara seimbang. Artinya, melalui pendidikan sebagai humanisasi, manusia harus berusaha menjadikan dirinya sebagai makhluk yang dualitas (*loro-loroning atunggal*-dua aspek menjadi satu ibarat mata uang logam kedua sisinya adalah menyatu), yakni menubuh sekaligus meroh, mengindividuu sekaligus menyosial dan memateri sekaligus menyepiritual (Atmadja, 2019: 587).

Oleh karena itu, humanisme yang cocok bagi pedagogi kritis dalam konteks humanisasi untuk menjadikan manusia yang berkarakter holistik, bukanlah humanisme dalam arti humanisasi yang hanya menekankan rasionalitas tanpa konsep-konsep adikodrati, melainkan sebaliknya, yakni rasionalitas yang melibatkan *suara-suara adikodrati* (suara Tuhan) yang tertuang dalam bentuk agama (Atmadja, 2019: 581). Dalam konteks ini, humanisme yang diidealkan, meminjam gagasan Bolo (2008: 159-179) dan Vernon (2015) adalah *humanisme teistik*, bukan *humanisme ateistik* (Djehanah, 2008: 107-157; Vernon 2015), dan *humanisme dualitas*, bukan *monolitas* (Tarpin, 2008: 348). Pendidikan sebagai humanisasi harus memiliki sasaran yang mengarah kepada pendidikan yang terpadu dan holistik (Tarpin, 2008, 344). Humanisme yang menyatakan bahwa segala-segalanya adalah untuk manusia karena manusia adalah subjek utama hingga melahirkan tindakan mengultuskan manusia (Suhendar, 2018), tidak cocok dengan humanisme teistik dan dualitas untuk membentuk manusia yang berkarakter holistik.

Lantas, seperti apakah nalar humanisme dalam pedagogi kritis dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara (KHD), Paulo Freire (Freire), dan Peter McLaren (McLaren). Apakah dalam konsep maupun praktikalnya, masing-masing dari ketiga reformis pendidikan ktitis ini juga sudah mengakomodir prinsip-prinsip humanisme teistik dan dualitas.

**Tabel 1. Komparasi Nalar Humanisme dalam Pedagogi Kritis Perspektif Ki Hadjar Dewantara, Paulo Freire, dan Peter McLaren**

| Nalar           | Konsepsi  | Ki Hadjar Dewantara   | Paulo Freire  | Peter McLaren   |
|-----------------|---|---|---|---|
| Pedagogi Kritis | Persoalan pendidikan adalah persoalan politik melalui pemikiran kritis.   | <i>Hashtag:</i> Pendidikan Humanis dan Populis  | <i>Hashtag:</i> Konsientisasi dan Pendidikan Popular  | <i>Hashtag:</i> Pedagogi Kritis Revolusioner  |
|                 | Pedagogi kritis merupakan paradigma pendidikan yang menggabungkan teori dan praktik untuk membekali individu yang terpinggirkan dengan kesadaran yang | Cita-cita untuk mewujudkan pendidikan humanis dan populis tidak cukup hanya dicapai melalui pergerakan politik saja, tetapi juga harus dicapai melalui pendidikan rakyat, serta | Konsientisasi dan pendidikan populer merujuk pada upaya pembebasan diri manusia dari penjajahan harga diri dan kreativitas pendidikan melalui adanya proses | Bahwa pendidikan progresif hanya memberikan kesadaran individu. Untuk merubah suatu tatanan sosial, diperlukan adanya relasi sekolah dalam perspektif relasi sosial (pedagogi |

| Nalar     | Konsepsi   | Ki Hadjar Dewantara  | Paulo Freire   | Peter McLaren  |
|-----------|--|--|--|--|
|           | diperlukan dalam praksis emansipatoris.  | memperbaiki jiwa dan mental bangsa.  | kesadaran diri manusia atau "konsientisasi".   | kritis revolusioner).  |
|           | Budaya pendidikan harus mampu mendorong individu berpikir kritis, reflektif, berwawasan luas, serta mampu membuat penilaian moral yang seimbang, dan bertanggung jawab sosial. | Selain intelektual, budaya pendidikan harus diimbangi dengan pengembangan kecerdasan sosial dan afektif, sehingga memberikan peningkatan rasa percaya diri dan potensi diri. | Budaya pendidikan harus menempatkan manusia sebagai subyek, sehingga mampu hidup sesuai dengan perikemanusiaan (manusia merdeka).                  | Pedagogi kritis revolusioner bertujuan untuk menciptakan kondisi pedagogi dan kesadaran individu, sehingga pengembangan <i>skill</i> dan pengetahuannya terlindungi.   |
| Humanisme | Humanisme merupakan aliran pemikiran untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan cita-cita pergaulan hidup yang lebih baik.  | Pendidikan kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik harus direformasi.   | Tujuan pendidikan humanisasi pribadi maupun sesama melalui aksi yang jelas, sistematis, kreatif dan mampu merealisasikan kehidupan yang sejahtera. | Tujuan utama pedagogi kritis adalah membangun masyarakat baru yang lebih humanis.  |
|           | Humanisme atau humanisasi adalah mengolah potensi-potensi individu agar menjadi lebih "manusiawi".   | Visi pendidikan Perguruan Taman Siswa, bahwa hanya ada perkembangan alami bila anak didik; sesuai dengan kondisi alam materi, atas dasar bakat dan sesuai kondisi alamnya.   | Pendidikan harus berorientasi kepada pengenalan dan pemahaman jati diri individu dan umat manusia.   | Dari sekolah, siswa mampu mengembangkan pemahaman lebih kritis dan ilmiah berkaitan dengan kehidupan relasi sekolah dengan kondisi sosial budaya dan strategi aksinya. |

Sumber: Diolah dari berbagai referensi yang relevan

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa genuitas pemikiran KHD dalam bidang pendidikan *insight*, sesungguhnya dipicu oleh gerakan sosial, politik, dan budaya

---

sebagai respon KHD terhadap diskriminasi, hegemoni, represi, superioritas, dan sejenisnya oleh kolonial Belanda pada semua bidang kehidupan masyarakat Indonesia (1816–1942). Hal ini, menurut Dewantara dkk. (1952: 104–108) yang memunculkan pemikiran politik kemajuan dan kesetaraan, demokratisasi sebagai wujud partisipasi, dan resistensi terhadap kolonialisme, serta nasionalisme dan demokrasi sebagai wujud aksi, aliansi, dan nonkooperasi. Resistensi kultural KHD terhadap pemerintah kolonial pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk lahirnya Perguruan Taman Siswa/TS (1922).

Cita-cita TS (1922) adalah “*Memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa*”, dan “*memayu hayuning bawono*” (membahagiakan diri, bangsa, dan dunia). Untuk mewujudkan cita-cita ini tidak cukup hanya dicapai melalui pergerakan politik saja, tetapi harus dicapai dengan pendidikan rakyat, serta memperbaiki jiwa dan mental bangsa. Sistem pendidikan kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik diperlukan lawan tanding, yaitu pendidikan yang humanis dan populis (*hashtag*) (Marihandono, 2017: 33–160).

Menurut KHD, pendidikan yang mengena kepada bangsa Timur adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan (*wong cilik*), dan kebangsaan. Tiga hal inilah yang menjadi dasar jiwa KHD untuk mendidik bangsa dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan. Dalam konteks ini, KHD mengemukakan istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter, yaitu “*Patrap Guru*”, atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat. Perilaku guru dalam mendidik murid atau anak bangsa menjadi pegangan dan modal utama sehingga KHD menciptakan istilah yang kemudian sangat terkenal, yaitu: “*Ing ngarsa sung tulada*” (di depan memberi contoh)”, “*Ing madya mangun karsa*” (di tengah membangun cita-cita)”, dan “*Tut wuri handayani*” (di belakang mengikuti dan mendukungnya)” (Marihandono, 2017: 34).

Terdapat enam dasar pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Azas TS (Marihandono, 2017: 36–37). *Pertama, Dasar kemerdekaan*; yakni tentang setiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Ini dimaksudkan agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam tertib bersama. Ini termasuk menandakan kodrat alam dan kemajuan yang harus berjalan secara kodrati alias evolusi. Dasar ini yang mewujudkan sistem “*among*”, artinya guru-guru meski di belakang tetapi mempengaruhi dan memberi jalan kepada anak didik untuk berjalan sendiri. Inilah yang kemudian terkenal dengan istilah “*Tut wuri handayani*”. Selain itu, guru bisa memotivasi dan menginovasi pikiran murid dan sekaligus memberi contoh. *Kedua, Dasar kebudayaan*; yakni tentang kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Bahwa pendidikan Barat mementingkan kecerdasan dan melanggar dasar-dasar kodrati dari kebudayaan sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat memberi kepuasan. *Ketiga, Dasar kerakyatan*; yakni tentang pengajaran yang harus diperluas dan tidak hanya untuk sekelompok kecil masyarakat. *Keempat, Dasar kemandirian*; yakni tentang azas yang sangat penting bagi semua orang yang ingin mengejar kemerdekaan hidup. *Kelima, Syarat-syarat mengejar kemerdekaan dengan sistem mandiri*. *Keenam, Keharusan keikhlasan lahir batin* bagi guru dalam mendekati anak didik.

Selain itu, juga terdapat tujuh prinsip pendidikan TS, yaitu; 1) hak menentukan nasib sendiri, 2) siswa yang mandiri, 3) pendidikan yang mencerahkan masyarakat, 4) pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, 5) perjuangan menuntut kemandirian, 6) sistem ketahanan diri, dan 7) pendidikan anak-anak. Sebagai pedoman telah diterima semboyan TS, yakni “kembali dari Barat menuju nasional”, dengan penggunaan bahasa ibu sebagai pengantar pendidikan yang akan berdampak dalam menjalankan ibadah agama, penghapusan permainan, dan lagu-lagu anak-anak Belanda dan menggantinya dengan model nasional. Visi pendidikan TS adalah bahwa hanya ada perkembangan alami apabila anak didik; sesuai dengan kondisi alam materi, atas dasar bakat alamnya, dan sesuai kondisi alamnya.

Selain dalam cita-cita, visi, dasar dan prinsip, serta semboyan TS di atas, untuk membentuk manusia yang berkarakter holistik, KHD juga mengemukakan bermacam ragam

---

filosofi, ada yang sifatnya konseptual, pedoman operasional-praktis, dan fatwa atau nasehat (Wiryopranoto dkk., 2017: 1–207). Filosofi konseptual misalnya tentang tentang pendidikan yang diwujudkan dalam “*Tripusat Pendidikan*”, bahwa pembentukan kepribadian Sang Anak terjadi di tiga lingkungan pendidikan, yaitu; lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan kemasyarakatan. Pedoman operasional-praktis misalnya “*Tri Pantangan*” (pantang menyalahgunakan kekuasaan/wewenang, pantang menyalahgunakan keuangan, pantang melanggar kesusilaan). Fatwa atau nasehat misalnya “*Hak Diri untuk Menuntut Salam dan Bahagia*”, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin; dan “*Alam Hidup Manusia adalah Alam Hidup Perbulatan*”, bahwa hidup kita masing-masing ada dalam lingkungan berbagai alam khusus, yang saling berhubungan dan berpengaruh. Alam khusus: alam diri, alam kebangsaan, dan alam kemanusiaan. Rasa diri, rasa bangga, dan rasa kemanusiaan senantiasa hidup dalam sanubari kita masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pedagogi kritis berparadigma humanisme teistik dan dualitas perspektif KHD menekankan bahwa pendidikan harus didasarkan pada asas kemerdekaan yang berarti manusia diberi kebebasan dari Tuhan YME untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Tujuan pendidikan adalah kesempurnaan hidup manusia sehingga dapat memenuhi segala keperluan lahir dan batin yang diperoleh dari kodrat alam. KHD juga mengungkapkan mengenai pengertian pendidikan yang umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Masing-masing aspek ini tidak boleh dipisah-pisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan peserta didik selaras dengan dunianya (holistik).

Selain itu, dari tabel 1 di atas juga menunjukkan “hashtag” pendidikan kritis dalam pemikiran Freire, yakni “Konsientisasi dan Pendidikan Populer”. Konsep pendidikan Konsientisasi Freire adalah mengeluarkan manusia dari penjajahan harga diri dan kreativitas pendidikan yang membebaskan. Pembebasan diri dapat diperoleh melalui adanya kesadaran atau konsientisasi. Konsep ini menempatkan manusia sebagai subyek dalam kehidupan, artinya mampu mengekspresikan keinginan dan kreativitasnya, bukan sebagai obyek atau selalu menerima perlakuan dari orang lain, sehingga manusia mampu hidup sesuai dengan kodratnya yaitu manusia yang merdeka (Freire, 1999).

Menurut Freire, pendidikan bertujuan untuk humanisasi baik pribadi maupun sesama yaitu melalui sebuah aksi yang jelas, sistematis, kreatif, dan mampu merealisasikan kehidupan yang sejahtera. Pendidikan harus berorientasi kepada pengenalan dan pemahaman jati diri seseorang dan umat manusia. Pendidikan berperan penting dalam eksistensi manusia, sehingga pendidikan kaum tertindas berorientasi untuk mengembalikan kebebasan dan kemanusiaan. Fakih (2001) menyebutkan, berdasarkan kebebasan dan kemanusiaan, Freire mengamati bahwa inti dari pendidikan yaitu proses penyadaran (*conscientizacao*). Ia membagi kesadaran menjadi tiga tahap sebagai berikut.

*Pertama*, Kesadaran Magis (*Magical Consciousness*). Tahap kesadaran ini adalah dimana manusia tidak mampu mengidentifikasi ketidakmampuannya atau faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran. Contoh sederhananya, masyarakat tidak sadar akan hubungan dan keterkaitan antara kebijakan ekonomi dan politik terhadap kemiskinan. Tahap ini lebih melihat faktor luar manusia sebagai penyebab ketidakberdayaannya. *Kedua*, Kesadaran Naif (*Naïval Consciousness*). Tahap kesadaran ini lebih melihat pada aspek-aspek manusia sebagai asal muasal problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Freire, kesadaran akan berkembang manakala manusia mulai mampu meningkatkan kemampuannya dalam menangkap dan menanggapi persoalan-persoalan yang berasal dari lingkungannya. Pada tahap ini kemampuan dialog mulai berkembang. *Ketiga*, Kesadaran Kritis (*Critical Consciousness*). Tahap kesadaran ini lebih menekankan pada aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menekankan analisis secara kritis, menyadari

---

bahwa sistem dan struktur budaya, ekonomi, politik dan budaya berakibat pada tatanan kehidupan masyarakat.

Proses konsientisasi berkaitan erat dengan keadaan kultural manusia, dan berlangsung dengan membuka selubung realitas yang mengungkung dan mengasingkan manusia dari dunianya. Konsientisasi mencerminkan perkembangan bangkitnya kesadaran. Menurut Freire, tahap kesadaran (konsientisasi) inilah yang paling penting dalam dunia pendidikan. Berdasarkan konsep konsientisasi, Freire menentang sistem pendidikan yang pasif dan tidak berkembang. Dalam dunia pendidikan sangat kental dengan nuansa penindasan, sehingga Freire merasakan ketidakefektifan dalam menjalankan pendidikan. Sistem pendidikan inilah yang disebut dengan pendidikan gaya bank, yaitu guru seakan-akan menjadi seorang yang memiliki uang yang banyak dan menyimpannya di bank, sedangkan siswa dijadikan sebagai rekening yakni menampung seluruh informasi.

Freire mempertentangkan sistem pendidikan pembebasan dengan sistem pendidikan otoriter yang dia istilahkan sebagai "*banking education*". Berdasarkan konsep pembebasan, pendidikan *banking* memisahkan pelajar dari konten dan proses belajar mengajar. Sistem ini menjadikan ilmu pengetahuan seakan-akan barang yang bisa dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain (Yunus, 2007). Pendidikan *banking* berarti ilmu pengetahuan ditransfer dari pengajar ke pelajar. Hal ini memberikan stigma bahwa pengajar mengetahui semua hal, sedangkan siswa tidak mengetahui apapun. Guru menyampaikan dan menentukan materi yang harus diterima pelajar untuk selanjutnya dihafal dan diulang-ulang secara sistematis. Sistem pendidikan seperti menjadi instrumen penindasan yang melarang dan menghalangi penyelidikan, kreatifitas dan dialog. Pendidikan gaya bank tradisional sangat kontras dengan dialog yang tidak pernah mempertentangkan manusia dengan alam, subyek dengan obyek atau guru dengan murid (Collin, 2002).

Freire membuatnya jelas bahwa pendidikan *banking* telah mendikotomikan kesadaran dan dunia, maka dari itu sistem pendidikan ini telah mendomestifikasi realitas. Sementara guru bertindak sebagai subyek, konsep kesadaran statis dan naturalistis (Freire, 1968). Siswa yang mudah untuk dibentuk karakter dan pola pikirnya, adalah siswa yang baik. Sementara yang menolak untuk dibentuk, maka dia adalah siswa yang bermasalah. Oleh karenanya, *banking education* menindas masyarakat karena alasan; 1) memitologikan realitas sesuatu yang mana oleh individu dianggap sebagai penonton yang harus beradaptasi, 2) menolak dialog, 3) menjadikan siswa sebagai obyek yang dibantu, 4) membatasi kreatifitas, dan 5) gagal untuk mengakui keberadaan umat manusia yang historis (Santoso, 2003).

Sebaliknya Freire menawarkan konsep kebebasan atau yang dia istilahkan sebagai "*problem posing education*" yang berlandaskan pada keterkaitan demokrasi guru dan murid. Ia mengusulkan suatu "*partnership*" antara guru dan murid terdapat saling interaksi yang menguntungkan. Demokratisasi isi dan metode pembelajaran memacu penelitian, kreativitas dan kekritisan yang mendorong munculnya kesadaran (Freire, 1968). Untuk itu pendidikan pembebasan harus mencakup beberapa aspek, diantaranya; 1) memposisikan diri sebagai agen demitologisasi dalam menghadapi masalah, 2) menganggap dialog sebagai hal yang tidak bisa ditawar-tawar dalam rangka tindakan kognisi yang menyingkap realitas, 3) mendorong peserta didik untuk berfikir kritis dan sistematis, 4) berdasarkan kreatifitas dan merangsang refleksi dan aksi yang bernar terhadap realitas, dan 5) mengakui sejarah umat manusia sebagai *starting point*-nya.

Dalam konteks ini, pendidikan sedapat mungkin menghindarkan metode monologis dan monoton dalam proses pembelajaran. Metode yang berkarakteristik dialogis memungkinkan terjadinya komunikasi dan dialog multiarah antara pendidik dan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik yang lain, dan pendidik-peserta didik dengan lingkungan sumber belajar. Salah satu tugas pendidik yang berat ialah membantu peserta didik untuk dapat berbicara dan mengungkapkan pendapat dan pikirannya, dan setelah ia lancar dalam pengungkapan pikiran dan pendapatnya, tugas berikutnya adalah memurnikan

---

pikiran dan pendapatnya, sehingga peserta didik diarahkan pada kesadaran akan pencapaian kebenaran yang logis, obyektif, dan murni (Mantovanny, 2017).

Perkembangan yang digagas oleh Freire sejalan dengan tahap perkembangan Kohlberg dan Mayer yaitu perjalanan hidup dan pengalaman empiris manusia sangat menentukan perkembangan manusia. Perkembangan pada manusia tidak hanya berdasarkan pada pengalaman pribadi tetapi juga faktor lingkungan. Ia menyatakan bahwa pendidikan sebagai sebuah keadaan gnosiologis yang berarti mempermasalahakan apa yang dipikirkan oleh guru dan murid sebagai subyek dalam proses mengetahui (Smith, 2001).

Sebagai praktisi pendidikan, Freire mengembangkan pendidikan populer yang menekankan dialektika atau model dialogis antara pendidik dan murid. Meskipun banyak kesamaan dengan pendidikan alternatif, pendidikan populer adalah model pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dan memungkinkan mereka untuk menjadi lebih sadar tentang bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi individu terhubung ke masalah sosial yang lebih besar. Kata populer dalam pengertiannya lebih menunjuk kepada petani, pengangguran, kelas pekerja menengah ke bawah. Dalam konteks ini, pendidikan populer lebih berpihak pada kelompok termiskin, terpinggirkan serta tertindas. Salah satu contoh pengalaman yang sangat kuat ditunjukkan oleh gerakan yang dilakukan Freire dalam mempraktikkan pendidikan keaksaraan untuk orang dewasa di komunitas petani Amerika Latin. Jadi menurut Freire pedagogi kritis berkaitan dengan perkembangan kesadaran yang diterjemahkan sebagai "kesadaran kritik". Kebebasan harus dimulai dengan adanya suatu pengakuan atas relasi yang menindas dalam sebuah sistem (Hidayat, 2013).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pedagogi kritis berparadigma humanisme teistik dan dualitas perspektif Freire lebih menekankan pada konsep dan praktikal pedagogi melalui "hashtag" konsientisasi dan pendidikan populer, sebagaimana penjelasan di atas.

Adapun tentang nalar humanisme dalam pedagogi kritis dalam pemikiran McLaren dapat dilihat melalui "hashtag" Pedagogi Kritis Revolusioner. Para pendidik progresif, mengembangkan dan memperjuangkan nilai demokrasi di masyarakat. Usaha mereka tersebut berhasil menumbuhkan jiwa nasionalisme yang demokratis secara individualistik. Akan tetapi, untuk mengubah suatu tatanan sosial, hal tersebut tidak cukup. Pendidikan progresif hanya memberikan kesadaran pada individu yang tidak dapat menangkap penyebab sosial dari gejala negatif kapitalisme (McLaren, 2010). Dalam mengembangkan *pendidikan kritisnya*, McLaren telah lama menawarkan saran-saran "provokatif" untuk mempromosikan pendidikan kritis sebagai salah satu alternatif teoritis guna melawan pedagogi prokapitalis. Pedagogi kritis, atau pendidikan kritis menurutnya merupakan pendekatan untuk memahami relasi sekolah dari perspektif relasi sosial, khususnya dalam hal produksi masyarakat kapitalis. Relasi tersebut terlihat pada struktur kekuasaan yang ada pada masyarakat. Menurutnya, struktur kekuasaan juga terintegrasi dengan sistem produksi kapitalis (Hidayat, 2013).

Pedagogi kritis revolusioner atau juga disebut dengan pendidikan kritis revolusioner bertujuan untuk mencoba menciptakan kondisi kemungkinan pedagogis dan kesadaran para siswa, agar skill dan pengetahuan yang mereka alami dilindungi, dan tidak dieksploitasi secara publik sesuai dengan keperluan sumber daya untuk melayani kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan banyak orang (McLaren, 2010). Dengan kata lain, tujuan yang diinginkan adalah kesadaran yang dimiliki siswa, agar apa yang mereka alami di dalam kelas, skill yang mereka asah dalam proses pendidikan tidak didekte oleh para kapitalis yang siap mengeksploitasi mereka.

Tujuan utama pedagogi kritis adalah membangun masyarakat baru yang lebih humanis. Pelaksanaannya dimulai dari sekolah, sebagai tempat pendidikan dengan menekankan pengalaman siswa dari praktik lapangan. Dengan pengalamannya tersebut, para siswa mampu mengembangkan pemahaman yang lebih kritis dan ilmiah berkaitan dengan

---

kehidupan sehari-harinya dalam rangka untuk berhubungan (berelasi) dengan kondisi sosial budayanya (teoritis), selanjutnya para siswa dapat membangun strategi aksinya berdasarkan pemahaman baru melalui praktik tersebut (Suharto, 2012). Untuk itu, tujuan utama pedagogi kritis adalah memberdayakan (*empower*) masyarakat yang terpinggirkan sehingga terjadilah kesetaraan dan keadilan sosial. Penekanannya, bahwa pendidikan merupakan politik yang memiliki kepentingan untuk perbaikan kehidupan sosial (McLaren, 2003). Dalam menjelaskan hubungan antara pendidik dan peserta didik, McLaren menyebutkan perlu adanya penelitian dan penjelasan tentang 4 istilah di dalam kegiatan belajar mengajar. Keempat istilah itu adalah *teaching*, *pedagogy*, *critical pedagogy*, dan *revolutionary pedagogy*.

*Teaching* merupakan proses mengorganisasi dan mengintegrasikan pengetahuan dengan tujuan mengomunikasikan pengetahuan kepada siswa melalui pertukaran pemahaman dalam konteks yang telah ditetapkan sebelumnya. *Pedagogy* adalah memposisikan pertemuan pendidik dan peserta didik dalam konteks yang lebih luas, dimana kekuatan historis dalam politik yang terdapat dalam proses “tindakan mengetahui” dikenalkan dan dipertimbangkan sebagai objek pengetahuan siswa. *Critical pedagogy* merupakan proses dialektis dan dialogis di dalam pertukaran pendidik dan peserta didik untuk mengkonstruksi ulang atau menyusun kembali, memfungsikan kembali, dan menggugat kembali masalah pemahaman, sehingga menjadikan dimensi relasi *power/knowledge* sebagai induknya.

Dalam pendidikan kritis, pendidik dan peserta didik harus saling berdiskusi bahkan berdebat dalam menentukan kebenaran, sehingga objektivitas akan terjaga dengan adanya diskusi dan dialektika. Mengingat bahwa pendidikan kritis revolusioner melampaui tujuan *teaching*, *pedagogy*, dan *critical pedagogy*. Dalam ketiga taraf tersebut, seorang pendidik tidak hanya melakukan transfer ilmu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik juga harus menanyakan hakikat ilmu yang dia pelajari, alasan kenapa dia mempelajari, dan siapa yang menentukan bahwa dia harus mempelajari ilmu tersebut. Adapun di dalam pendidikan kritis revolusioner jelas bahwa tujuan pendidikan adalah *empowering* atau memberdayakan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki (Mushodiq, 2021). Pedagogi kritis revolusioner dimaksudkan untuk mengembangkan konsep Konsientisasi Freire. Kegiatan pendidik terdiri dari menjadikan siswa aktif dalam mata pelajaran; dan pendidikan bukanlah kegiatan indoktrinasi. Sifat dialektis dari teori kritis memungkinkan peneliti pendidikan untuk melihat sekolah tidak hanya sebagai arena indoktrinasi atau sosialisasi atau tempat pengajaran, namun juga sebagai medan budaya yang mendorong pemberdayaan siswa dan transformasi diri (McLaren, 1998).

*Konsen pertama* McLaren adalah keprihatinannya terhadap perspektif pendidikan secara umum, yaitu analisisnya mengenai relasi pendidikan dan kapitalisme, serta relasi kapitalisme dan ilmu pengetahuan yang terjadi di Amerika dan seluruh dunia pada umumnya. McLaren tidak menganjurkan keadilan sosial, dalam arti menyamakan sumber daya di bawah kapitalisme. McLaren mendukung transformasi menuju sebuah sosialis alternatif (*Pedagogis Revolusioner Materialis*), yakni kapitalis dan pendidikan sama-sama berjalan secara menguntungkan, dan keduanya menganggap sama pentingnya bersinergi.

*Konsen kedua* McLaren adalah tentang relasi antara kapitalisme dan ilmu pengetahuan yang telah mengakibatkan korporasi pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus melayani kepentingan kelas dominasi (*pedagogi kritis revolusioner*), yakni penegasan konsep berbasis perspektif humanis Marxis untuk berbagai masalah pendidikan. McLaren melakukan praktik reformasi sekolah yang berada pada level kebijakan, kurikulum, dan pedagogi ruang kelas. Sekolah harus menjadi ruang produksi pengetahuan kritis dan aksi sosiopolitik. Sekolah harus mendidik siswa untuk menjadi agen aktif untuk transformasi sosial dan kewarganegaraan kritis. Tujuannya adalah menyiapkan generasi baru yang lebih cakap untuk menganalisis kondisi sosial material dalam seluruh kehidupan. Dalam analisis akhirnya, pedagogi kritis perlu memperbaharui komitmen mereka untuk kaum tertindas, sehingga dapat memandu

---

aksi politik dan mendesain kondisi untuk harapan akar rumput dan praksis pembebasan (Hidayat, 2013).

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pedagogi kritis berparadigma humanisme teistik dan dualitas perspektif perspektif McLaren terletak pada konsep dan praktikal pedagogi kritis revolusioner sebagai pengembangan konsep dan praktikal Konsientisasi Freire.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan: *Pertama*, nalar humanisme dalam pedagogi kritis Ki Hadjar Dewantara (KHD) ditegaskan melalui pendidikan yang humanisme dan populis, artinya sistem pendidikan corak kolonial yang materialistik, individualistik, dan intelektualistik harus ditinggalkan. Pendidikan yang humanis, kerakyatan (*wong cilik*), dan kebangsaan merupakan dasar jiwa KHD untuk mendidik bangsa, dan mengarahkannya kepada politik pembebasan atau kemerdekaan dan kemandirian. Istilah yang harus dipatuhi dan menjadi karakter yaitu "*Patrap Guru*" atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat, meliputi: "*Ing ngarsa sung tulada*" (di depan memberi contoh)", "*Ing madya mangun karsa*" (di tengah membangun cita-cita)", dan "*Tut wuri handayani*" (di belakang mengikuti dan mendukungnya)".

*Kedua*, nalar humanisme dalam pedagogi kritis Paulo Freire ditegaskan melalui konsep konsientisasi (proses penyadaran) yang menempatkan manusia sebagai subyek dalam kehidupan, artinya peserta didik harus mampu mengekspresikan keinginan dan kreatifitasnya, bukan sebagai obyek atau selalu menerima perlakuan dari orang lain, sehingga manusia mampu hidup sesuai dengan kodratnya yaitu manusia yang merdeka. Freire menentang sistem pendidikan *banking* yang berarti ilmu pengetahuan ditransfer dari pengajar ke pelajar. Hal ini memberikan stigma bahwa pengajar mengetahui semua hal, siswa tidak mengetahui apapun. Guru menyampaikan dan menentukan materi yang harus diterima pelajar untuk selanjutnya dihafal dan diulang-ulang secara sistematis.

*Ketiga*, pedagogi kritis Peter McLaren menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membangun masyarakat baru yang lebih humanis (nalar humanisme). Untuk itu tujuan utama pedagogi kritis adalah memberdayakan (*empower*) masyarakat yang terpinggirkan sehingga terjadilah kesetaraan dan keadilan sosial. Pendidik dan peserta didik harus saling berdiskusi bahkan berdebat dalam menentukan kebenaran, sehingga objektifitas akan terjaga dengan adanya diskusi dan dialektika. Sementara pedagogi kritis revolusioner mempertegas bahwa tujuan pendidikan adalah *empowering* atau memberdayakan siswa sesuai dengan potensi yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka" *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 974-980 2022. Available at: <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Ainia, Dela K. "Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter," *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3 No. 3 (2020), pp. 95-101, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/24525>, Diunduh tgl. 14 November 2023.
- Atmadja, Nengah Bawa. 2019. *Wacana Postgenerik terhadap Tri Hita Karana pada Masyarakat Bali*. Singaraja: Program Studi Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Sosiologi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha.
- Efendi, Pitri M., Tatang Muhtar, dan Yusuf Tri Herlambang, "Relevansi Kurikulum Merdeka dengan Konsepsi Ki Hadjar Dewantara: Studi Kritis dalam Perspektif Filosofis-

- 
- Pedagogis," *Jurnal Elementaria Edukasia*, Volume 6, No. 2, Juni 2023, DOI: <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5487>, pp. 548–561, Diunduh tgl. 11 November 2023.
- Collins, Denis. 2002. *Paulo Freire: His Life, Works And Thought*, terj. Henry Heyneardhi dan Anastasia P. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Komunitas Apiru Yogyakarta.
- Damawati, Nyoman Ari Cahyani. 2014. *Resume Buku "Pendidikan Kaum Tertindas" Karya Paulo Freire*. Bandung: Prodi Pendidikan Ipa Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dewantara, dkk. 1952. *Taman Siswa 30 Tahun*. Yogyakarta: Majelis Luhur Perguruan Taman Siswa.
- Fakih, Mansour dkk. 2001. *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: Read Book.
- Fatmawati, Fasiha dkk. 2023. "Penguatan profil pelajar Pancasila dalam pandangan perenialisme dan progresivisme". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol 10, No 2 (2022). Available at: DOI: <https://doi.org/10.21831/jppfa.v10i2.56969>.
- Freire, Paulo. 1968. *Pedagogy Of The Oppressed*. New York: Herder Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo dkk. 1999. *Menggugat Pendidikan Fundamentalisme Konservatif Liberal Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Giroux, H. 2011. *On Critical Pedagogy*. London: The Continuum International Publishing Group.
- Hasan, Abd. Wahid & Lailatus Syarifah. "Titik Temu Konsientasi Poulo Freire dan Penguatan Profil Pelajar Pancasila Nadiem Makarim". *Al-Amin: Kajian Pendidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 8-No. 1- Juni 2023, 30–39, <https://ojs.kopertais14.or.id/index.php/alamini/article/view/284>.
- Hidayat, R., 2013. *Pedagogi Kritis: Sejarah, Perkembangan, dan Pemikiran*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Nurul. "Pendekatan-Pendekatan Pengembangan Kurikulum," *Qudwatunâ: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2 No.2 (2019).
- Kilag, Osias Kit T. et. al. "Transformative Education: A Study of Teaching Values Education-Based on Paulo Freire's Philosophy of Education". *EXCELLENCE: International Multi-Disciplinary Journal Of Education*, Vol. 1, Issue No. 1 (2023).
- Lawton, Peter. "Paolo Freire's Conscientization". *RoSE-Research on Steiner Education*, Vol.13 No.1 (2022), [www.rosejournal.com](http://www.rosejournal.com)
- Mantovanny, Marius. (2017). "Menggagas Ulang Transformasi Pendidikan yang Berkesadaran Humanis, Dialogis, Kritis, Liberatif dan Ekologis". *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, Vol 4 No 1.
- Marihandono, Djoko. 2017. *Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung: Jejak Soewardi Soerjaningrat Hingga Pembuangan*. Jakarta: Makalah Seminar "Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dari Politik ke Pendidikan.
- McLaren, P. 1998. "Critical Pedagogy: A Look at the Major Concepts, in: McLaren, P. *Life in Schools*". *An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education* (pp. 170-198). Third Edition, New York: Longman.
- Mushodiq, M.A. 2018. "Majaz Al-Quran Pemicu Lahirnya Ilmu Balaghah". *An Nabighoh: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Arab* 20, 45–62. <https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v20i01.1133>
- Musliikh. 2022. *Pendidikan Islam di Era Merdeka Belajar Perspektif Pemikiran Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. Depok: Rajawali Pers.
- Nata, Abuddin. 2001. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nuryanto, M Agus. 2003. "Refleksi Pendidikan Bersama Paulo Freire", *Kompas*, 05 Mei 2003.
- Santoso, Listiyono. dkk. 2017. *Epistemologi Kiri*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

- 
- Segalerba, Gianluigi & Oleg Yurievich Latyshev-Maysky. "Pedagogy as Education to Active Thinking: the Projects of John Dewey, Paulo Freire and Peter McLaren", *revista portuguesa de pedagogia*, Recebido a 05-08-2020 e aprovado a 14-12-2020.
- Sihaloho, Nelson. "Filosofi Merdeka Belajar, Penguatan Empat Pilar dan Digitalisasi Pendidikan," <https://bungonews.net/2022/08/10/filosofi-merdeka-belajar-penguatan-empat-pilar-dan-digitalisasi-pendidikan/#> , Diunduh tgl. 10 November 2023.
- Sholihah, Dyahsih A. "Pendidikan Merdeka dalam Perspektif Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya terhadap Merdeka Belajar di Indonesia," *Jurnal LITERASI: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Volume 12, No. 2 Desember 2021, pp. 115, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/LITERASI/issue/view/155>, Diunduh tgl. 10 November 2023.
- Suharto, T. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat; Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan*. Lkis Pelangi Aksara.
- Suprihatin, "Pendekatan Humanistik dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam", *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol.3 No.1 (2017).
- TIM Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyuni, Sri dkk. 2021. *Negara dan Pendidikan dalam Perspektif Pedagogi Kritis*. Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Wattimena, Reza A.A. "Pedagogi Kritis: Pemikiran Henry Giroux Tentang Pendidikan dan Relevansinya untuk Indonesia", *Jurnal Filsafat*, ISSN: 0853-1870 (print); 2528-6811 (online) Vol. 28, No. 2 (2018), p. 180-199, doi: 10.22146/jf.34714 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Wiryo Pranoto, Suhartono dkk. 2017. *KI HAJAR DEWANTARA: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yamin, Moh. 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia, Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Yaniawati, R.P. 2020. Penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Disajikan pada acara "Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan" di Lingkungan Dosen FKIP Unpas, 14 April 2020, 1-31. Available at: <https://fkip.unpas.ac.id/include/downlot.php?file=Penelitian%20Studi%20Kepustakaan.pdf>.
- Yunus, Firdaus M. 2007. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial; Paulo Freire dan Y.B. Mangun Wijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Zuriatin dkk. "Pandangan dan Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dalam Memajukan Pendidikan Nasional". *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 11, No. 1, Juni 2021, DOI: 10.37630/jpi.v11i1.442.